

SKRIPSI

**PENERTIBAN TERHADAP BANGUNAN RUMAH TOKO (RUKO) YANG
BELUM MEMILIKI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KOTA
BUKITTINGGI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:



Program Kekhususan: Hukum Administrasi Negara (PK VII)

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. Anton Rosari, S.H., M.H

Sucy Delyarahmi, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

2025

	No. Alumni Universitas		Amanda Novita		No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir	: Bukittinggi /02 November 2002	f. Tanggal Lulus	: 20 Agustus 2025	
	b. Nama Orangtua	: Yulhendri, Azizah Usman	g. Predikat Lulus	: Dengan Pujian	
	c. Fakultas	: Hukum	h. Lama Studi	: 4 Tahun 0 Bulan	
	d. PK	: Hukum Administrasi Negara	i. IPK	: 3,77	
	e. No. BP	: 2110113161	j. Alamat	: Guguak tinggi, Kab. Agam, Bukittinggi	

PENERTIBAN TERHADAP BANGUNAN RUMAH TOKO (RUKO) YANG BELUM MEMILIKI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KOTA BUKITTINGGI

(Amanda Novita, 2110113161, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2025)

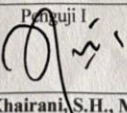
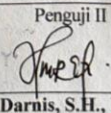
ABSTRAK

Pada setiap fungsi bangunan membutuhkan Persetujuan Bangunan Gedung setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, sebelumnya bernama Izin Mendirikan Bangunan. Izin Mendirikan Bangunan maupun Persetujuan Bangunan Gedung tetap harus dilakukan pengawasan oleh Pemerintah. Bangunan yang akan dibangun ataupun perubahan dalam fungsi bangunan maka perseorangan wajib melaporkan untuk pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung, akan tetapi dalam kenyataannya masih ada ditemukan pelanggaran sehingga mengganggu tata kota. Perumusan masalah dari skripsi ini adalah Pertama, bagaimana penertiban terhadap bangunan ruko yang belum memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung? Kedua, bagaimana pengenaan sanksi administrasi terhadap bangunan ruko yang belum memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Bukittinggi?. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan ialah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penertiban terhadap bangunan ruko yang belum memiliki izin PBG yaitu berupa peringatan tertulis, pencabutan PBG, dan pembongkaran terhadap suatu bangunan, serta pengenaan sanksi terhadap bangunan yang belum memiliki PBG yaitu dikenakan sanksi berupa penyegelan dan pembongkaran bangunan gedung, apabila pelanggar tetap mengabaikan teguran tertulis yang diberikan dari awal sampai tahap terakhir. Pengenaan sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Kata Kunci: Penertiban, Sanksi administratif, Bangunan Gedung, Persetujuan Bangunan Gedung

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 20 Agustus 2025

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
		
Amanda Novita	Dr. Khairani, S.H., M.H.	Darnis, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara: **Hendria Fitriana, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	Alumni University Number		Amanda Novita		Alumni University Number		
	a.	Place/Date of Birth : Bukittinggi/02 nd November 2002				f.	Graduation Date : August 20 th 2025
	b.	Parents' Name : Yulhendri, Azizah Usman				g.	Pass Predicate : Cumlaude
	c.	Faculty : Law				h.	Length of Study : 4 years 0 month
	d.	Concentration : Administrative Law				i.	GPA : 3,77
	e.	Student ID : 2110113161				j.	Address : Guguak tinggi, Kab. Agam, Bukittinggi

REGULATION OF SHOPHOUSE BUILDINGS THAT DO NOT HAVE BUILDING PERMITS IN BUKITTINGGI CITY

(Amanda Novita, 2110113161, Concentration Program Administrative Law (CP VII), Faculty of Law, Andalas University, 2025)

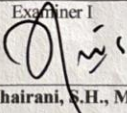
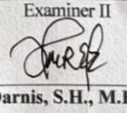
ABSTRACT

In each building function requires the approval of a building after the issuance of Government Regulation Number 16 of 2021 concerning Regulation of Implementation of Law Number 28 of 2002 concerning Buildings, previously named a building permit. Building permit and building approval must still be supervision by the government. Buildings to be built or changes in building functions, individuals are required to report for the management of buildings, but in reality there are still violations so that they disrupt the urban planning. The formulation of the problem of this thesis is first, how to control the shophouse building that does not yet have a building approval permit? Second, how is the imposition of administrative sanctions on shophouse buildings that do not yet have a building approval permit in Bukittinggi city? The research method used is empirical juridical. Data collection techniques conducted by interviews and document studies. The data analysis used is qualitative. Based on the result of the study it is known that controlling the shophouse building that does not yet have a PBG permit is in the form of written warnings, revocation of PBG, and demolition of a building as well as the imposition of sanctions for building that do not have PBG, which is subject to sanctions in the form of sealing and demolition of buildings, if violators continue to ignore written reprimands given from the beginning to the last stage. Imposition of administrative sanctions given to violators in accordance with Government Regulation Number 16 of 2021 concerning Regulations for Implementing Law Number 28 of 2002 concerning Buildings.

Keywords: Control, Administrative Sanctions, Buildings, Building Approval

This minor thesis has defended in front of the examiner team at August 20th, 2025.

Examiner,

Signature	Examiner I	Examiner II
		
Amanda Novita	Dr. Khairani, S.H., M.H	Darnis, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Department of Administrative Law: **Hendria Fitrina, S.H., M.H.**



Signature

Alumni has been registered in the faculty/university under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Faculty Alumni	Name:	Signature:
No. University Alumni	Name:	Signature: